

## **IMPLEMENTASI DISTIBUSI PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN PRINSIP ENAM TEPAT DAN PEMANFAATANYA PADA USAHATANI PADI SAWAH DI DESA BENTE DAN DESA RANGKA KECAMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA**

Weni Fitriani, La Nalefo\*, Edy Syah Mihad

Jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

\* **Corresponding Author:** [la.nalefo\\_faperta@uho.ac.id](mailto:la.nalefo_faperta@uho.ac.id)

### **To cite this article:**

Fitriani, W., Nalefo, L., & Mihad, E. S. (2026). Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Prinsip Enam Tepat dan Pemanfaatannya pada Usahatani Padi Sawah di Desa Bente dan Desa Rangka Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna. *JIIKPP (Jurnal Ilmiah Inovasi dan Komunikasi Pembangunan Pertanian)*, 5 (3), 427 – 444. <http://doi.org/10.56189/jiikpp.v5i3.99>

**Received:** 6 Mei 2026; **Accepted:** 18 Juli 2026; **Published:** 30 Juli 2026

### **ABSTRACT**

The distribution of subsidized fertilizers is a strategic government policy aimed at improving farmers' access to agricultural inputs and enhancing lowland rice productivity. The effectiveness of this policy depends not only on the efficiency of the distribution system but also on the proper utilization of fertilizers in accordance with recommended agricultural practices. This study aimed to analyze the implementation of subsidized fertilizer distribution based on the Six Right Principles and to describe its utilization in lowland rice farming in Bente and Rangka Villages, Kabawo District, Muna Regency. A quantitative approach employing a survey method was applied. A total of 56 farmers were selected using proportional random sampling from a population of 125 subsidized fertilizer recipients. Data were collected through structured interviews, field observations, and documentation, and were analyzed descriptively using frequency distributions and percentages. This study offers a more comprehensive perspective by integrating the evaluation of subsidized fertilizer distribution based on the Six Right Principles with fertilizer utilization practices at the farm level. The results revealed that the implementation of subsidized fertilizer distribution successfully fulfilled five of the six indicators, namely the right place (85.71%), the right type (100%), the right price (78.57%), the right time (71.43%), and the right target (100%). However, the right quantity indicator remained relatively low (44.64%) because the allocated fertilizer was insufficient to meet farmers' actual needs. Regarding fertilizer utilization, all respondents applied the recommended types of fertilizers (Urea and NPK), while 69.64% applied the recommended fertilizer dosage and 76.79% applied fertilizers at the appropriate time. The insufficient quantity of subsidized fertilizers prompted some farmers to adjust fertilizer application rates, indicating that the effectiveness of fertilizer utilization was strongly influenced by the quality of the distribution system. Therefore, improving the effectiveness of the subsidized fertilizer policy requires refining allocation mechanisms based on site-specific fertilizer requirements, regularly updating the electronic Definitive Group Needs Plan (e-RDKK) database, and strengthening the role of agricultural extension workers in promoting balanced fertilization practices to enhance the productivity and sustainability of lowland rice farming.

**Keywords:** *Agricultural Extension, Agricultural Productivity, Balanced Fertilization, e-RDKK.*

### **PENDAHULUAN**

Padi sawah merupakan komoditas pangan strategis yang memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, peningkatan

produktivitas padi menjadi salah satu prioritas utama pembangunan sektor pertanian. Upaya peningkatan produktivitas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor produksi, salah satunya adalah ketersediaan pupuk yang memadai baik dari aspek jumlah, jenis, maupun waktu penggunaannya. Pemupukan yang dilakukan secara tepat berperan dalam memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan, hasil panen, serta efisiensi usahatani padi sawah. Paiman et al (2021), menyatakan bahwa penggunaan pupuk yang sesuai mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi secara signifikan, sedangkan Suhada et al (2022) bahwa kecukupan unsur hara merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan produksi padi sawah.

Dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan subsidi pupuk sebagai salah satu instrumen untuk menjamin akses petani terhadap pupuk dengan harga yang terjangkau. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi usahatani, serta menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pupuk mencapai 9,43% dari total biaya usahatani padi sawah sehingga keberadaan pupuk bersubsidi memiliki kontribusi yang penting dalam mengurangi beban biaya produksi petani (Badan Pusat Statistik, 2017). Makhtunin (2025) juga menjelaskan bahwa subsidi pupuk masih menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah karena berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas sekaligus menjaga daya beli petani terhadap sarana produksi.

Pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Regulasi tersebut menegaskan bahwa implementasi distribusi pupuk bersubsidi harus memenuhi prinsip enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat sasaran penerima (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Keenam indikator tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk karena menentukan apakah pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai kebutuhan usahatani. Apabila salah satu indikator tidak terpenuhi, maka tujuan kebijakan subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Implementasi distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif penyaluran, tetapi juga memengaruhi bagaimana petani memanfaatkan pupuk dalam kegiatan budidaya. Distribusi yang tepat akan memungkinkan petani menggunakan pupuk sesuai rekomendasi jenis, dosis, dan waktu aplikasi sehingga efisiensi pemupukan dapat ditingkatkan. Sebaliknya, keterlambatan distribusi maupun keterbatasan jumlah pupuk dapat menyebabkan petani mengubah dosis pemupukan, menunda aplikasi pupuk, atau membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Arifin (2021), bahwa pemupukan yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan hara spesifik lokasi sehingga penggunaan pupuk dapat berlangsung secara efisien dan berkelanjutan. Afandi et al (2026) juga, menjelaskan bahwa dosis pemupukan yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi kesuburan tanah agar unsur hara dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tanaman.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan subsidi pupuk memberikan dampak positif terhadap akses petani terhadap pupuk dan peningkatan produktivitas usahatani. Situmorang et al (2026), melaporkan bahwa kebijakan subsidi pupuk mampu meningkatkan produktivitas usahatani padi sawah melalui kemudahan akses terhadap sarana produksi. Penelitian Srisri et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas distribusi pupuk dipengaruhi oleh kelancaran saluran distribusi dari distributor hingga kios pengecer resmi. Sementara itu, Anut et al (2026) mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah pupuk bersubsidi yang diterima petani menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas implementasi kebijakan subsidi pupuk di tingkat lapangan. Rozci & Rizkiyah (2024) juga, menyatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk yang belum berjalan optimal dapat meningkatkan biaya produksi petani akibat kebutuhan pembelian pupuk non-subsidi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas kebijakan atau saluran distribusi pupuk bersubsidi, sedangkan kajian yang menghubungkan implementasi distribusi berdasarkan prinsip enam tepat dengan praktik pemanfaatan pupuk pada tingkat usahatani masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan distribusi tidak hanya diukur dari tersalurkannya pupuk kepada petani, tetapi juga dari sejauh mana pupuk tersebut dimanfaatkan sesuai prinsip pemupukan berimbang sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas tanaman. Integrasi antara evaluasi implementasi distribusi dan pemanfaatan pupuk menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan program subsidi pupuk.

Kabupaten Muna merupakan salah satu sentra produksi padi sawah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang setiap tahun memperoleh alokasi pupuk bersubsidi. Kecamatan Kabawo termasuk wilayah yang memiliki aktivitas budidaya padi sawah cukup intensif dengan luas panen mencapai 252 hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten

Muna, 2024). Di Kecamatan Kabawo, Desa Bente dan Desa Rangka merupakan desa yang memiliki kelompok tani aktif sebagai penerima pupuk bersubsidi sehingga menjadi wilayah yang relevan untuk mengkaji implementasi distribusi pupuk berdasarkan prinsip enam tepat. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasi distribusi pupuk di kedua desa secara umum telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek tepat jenis dan tepat sasaran. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, terutama pada indikator tepat jumlah dan tepat waktu. Sebagian petani menyatakan bahwa jumlah pupuk yang diterima sesuai alokasi e-RDKK, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan riil lahan sehingga mereka harus membeli pupuk non-subsidi. Selain itu, keterlambatan distribusi pada sebagian petani menyebabkan waktu aplikasi pupuk tidak selalu sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi distribusi pupuk belum sepenuhnya menjamin optimalnya pemanfaatan pupuk pada tingkat usahatani.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis implementasi distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat yang dikaitkan secara langsung dengan praktik pemanfaatan pupuk oleh petani padi sawah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan implementasi kebijakan subsidi pupuk sekaligus menjadi dasar dalam penyempurnaan sistem distribusi dan pendampingan pemupukan di tingkat petani. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat serta mendeskripsikan pemanfaatannya pada usahatani padi sawah di Desa Bente dan Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna.

## MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif melalui metode survei. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis implementasi distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat serta pemanfaatannya pada usahatani padi sawah sesuai kondisi empiris di lapangan tanpa melakukan perlakuan terhadap variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh secara objektif sehingga mampu memberikan informasi mengenai karakteristik suatu objek atau kondisi tertentu.

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2026 di Desa Bente dan Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa kedua desa merupakan sentra produksi padi sawah yang secara rutin menerima alokasi pupuk bersubsidi, memiliki kelompok tani aktif, serta seluruh proses penyaluran pupuk telah menggunakan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian representatif untuk mengkaji implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat serta pemanfaatannya oleh petani dalam kegiatan usahatani padi sawah.

Populasi penelitian adalah seluruh petani padi sawah penerima pupuk bersubsidi yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Bente dan Desa Rangka sebanyak 125 orang. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10% sehingga diperoleh sebanyak 56 responden (Sugiyono, 2019). Selanjutnya, responden dipilih secara *proportional random sampling*, yaitu berdasarkan proporsi jumlah anggota kelompok tani pada masing-masing desa sehingga setiap petani penerima pupuk bersubsidi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden penelitian. Teknik ini digunakan agar sampel mampu merepresentasikan karakteristik populasi secara proporsional.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner kepada petani responden mengenai implementasi distribusi pupuk bersubsidi dan pemanfaatannya dalam usahatani padi sawah. Untuk memperkuat hasil penelitian, observasi lapangan dilakukan pada kios pengecer resmi dan lokasi usahatani guna memperoleh gambaran mengenai proses penebusan pupuk bersubsidi serta praktik pemanfaatannya oleh petani. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian Kabupaten Muna, kelompok tani, serta berbagai dokumen dan literatur ilmiah yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Penelitian ini mengkaji dua aspek utama, yaitu implementasi distribusi pupuk bersubsidi dan pemanfaatan pupuk bersubsidi. Implementasi distribusi dianalisis berdasarkan indikator prinsip enam tepat yang meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat sasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Adapun pemanfaatan pupuk dianalisis berdasarkan jenis pupuk yang

digunakan, kesesuaian dosis pemupukan, serta ketepatan waktu aplikasi pupuk pada tanaman padi sawah sebagai indikator penerapan pemupukan berimbang di tingkat petani.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui tahapan editing, coding, tabulasi, dan penyajian data sesuai indikator penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan tingkat implementasi distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat serta pemanfaatannya pada usahatani padi sawah. Persentase setiap indikator dihitung menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{N} \times 100$$

Keterangan :

P = Presentase  
f = Jumlah responden pada setiap kategori jawaban  
N = Jumlah seluruh responden

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dengan membandingkan temuan penelitian terhadap ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, teori distribusi sarana produksi pertanian, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi distribusi pupuk bersubsidi dan pemanfaatannya pada usahatani padi sawah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Prinsip Enam Tepat

Implementasi distribusi pupuk bersubsidi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan subsidi pupuk yang bertujuan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi dengan harga yang terjangkau. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh terselurkannya pupuk kepada petani, tetapi juga oleh kesesuaian proses distribusi dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, implementasi distribusi pupuk bersubsidi dievaluasi berdasarkan prinsip enam tepat, yaitu tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Keenam indikator tersebut merupakan tolok ukur untuk menilai efektivitas sistem distribusi dalam menjamin bahwa pupuk bersubsidi diterima oleh petani yang berhak, dalam jumlah yang sesuai, pada waktu yang dibutuhkan, serta melalui mekanisme distribusi yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap implementasi distribusi berdasarkan prinsip enam tepat menjadi penting karena setiap indikator memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas pemanfaatan pupuk pada tingkat usahatani. Ketidaksesuaian pada salah satu indikator, seperti keterlambatan distribusi atau ketidakcukupan jumlah pupuk, dapat memengaruhi keputusan petani dalam melakukan pemupukan, meningkatkan biaya produksi, bahkan berpotensi menurunkan produktivitas tanaman padi sawah. Sebaliknya, implementasi distribusi yang berjalan sesuai dengan prinsip enam tepat akan meningkatkan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi serta mendukung penerapan pemupukan yang lebih efektif dan efisien.

Petani padi sawah penerima pupuk bersubsidi di Desa Bente dan Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, diketahui implementasi distribusi pupuk bersubsidi menunjukkan capaian yang bervariasi pada masing-masing indikator. Beberapa indikator, seperti tepat jenis dan tepat sasaran, menunjukkan tingkat implementasi yang sangat baik, sedangkan indikator tepat jumlah dan tepat waktu masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembahasan implementasi distribusi pupuk bersubsidi dalam penelitian ini disajikan berdasarkan masing-masing indikator prinsip enam tepat agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di lokasi penelitian.

#### **Tepat Tempat**

Ketepatan tempat merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi karena berkaitan dengan kemudahan akses petani terhadap sarana produksi yang telah disediakan pemerintah. Distribusi pupuk tidak hanya ditentukan oleh tersedianya pupuk pada tingkat distributor atau kios pengecer resmi,

tetapi juga oleh kemampuan petani untuk memperoleh pupuk tersebut secara mudah, cepat, dan dengan biaya akses yang relatif rendah. Akses distribusi yang baik akan memperlancar kegiatan budidaya karena petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan pada saat musim tanam berlangsung. Sebaliknya, lokasi penebusan yang sulit dijangkau berpotensi meningkatkan biaya transportasi, memperpanjang waktu pengambilan pupuk, bahkan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pemupukan. Kemudahan akses terhadap kios pengecer resmi menjadi salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, ketepatan tempat diartikan sebagai kesesuaian lokasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui jaringan kios atau pengecer resmi yang mudah dijangkau oleh petani penerima sesuai wilayah administrasi dan alokasi yang telah ditetapkan. Hasil penelitian terhadap petani padi sawah di Desa Bente dan Desa Rangka, tingkat ketepatan tempat distribusi pupuk bersubsidi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ketepatan Tempat Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Bente dan Desa Rangka

| No.          | Alternatif Jawaban | Responden (Orang) | Persentase Ketepatan (%) |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1            | Tepat              | 48                | 85,7                     |
| 2            | Kurang Tepat       | 8                 | 14,3                     |
| <b>Total</b> |                    | <b>56</b>         | <b>100,0</b>             |

Sumber: Data Primer yang Diolah 2026.

Tabel 1, menunjukkan bahwa sebanyak 48 responden (85,71%) menyatakan lokasi penebusan pupuk bersubsidi telah mudah dijangkau, sedangkan 8 responden (14,29%) menyatakan akses menuju kios pengecer masih kurang mudah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi distribusi pupuk bersubsidi pada indikator tepat tempat secara umum telah berjalan dengan baik. Tingginya tingkat keterjangkauan lokasi penebusan mengindikasikan bahwa sebagian besar petani memperoleh pelayanan distribusi yang relatif efektif, sehingga proses penebusan pupuk dapat dilakukan tanpa menghadapi kendala geografis yang berarti. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran kegiatan usahatani karena pupuk sebagai input produksi utama dapat diperoleh dengan waktu dan biaya yang relatif efisien.

Kemudahan akses tersebut dipengaruhi oleh keberadaan kios pengecer resmi yang lokasinya relatif dekat dengan wilayah usahatani serta didukung oleh kondisi jaringan jalan yang cukup memadai. Kedekatan lokasi penebusan dengan lahan pertanian memungkinkan petani memperoleh pupuk tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang besar maupun kehilangan waktu kerja di lahan. Jika dilihat dari sudut pandang implementasi kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem distribusi yang dibangun pemerintah telah mampu mendekatkan layanan kepada kelompok sasaran sehingga meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. Semakin mudah akses menuju kios pengecer, semakin kecil hambatan transaksi yang harus ditanggung petani dalam memperoleh pupuk sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat 14,29% responden yang menyatakan lokasi penebusan pupuk belum sepenuhnya mudah dijangkau. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut terutama dialami oleh petani yang lokasi lahannya relatif jauh dari kios pengecer resmi serta berada pada wilayah dengan kondisi jalan yang kurang baik, terutama pada musim hujan. Hambatan tersebut menyebabkan petani membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama dan biaya transportasi yang lebih tinggi ketika melakukan penebusan pupuk. Keberhasilan implementasi distribusi pupuk tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pupuk di kios pengecer, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas wilayah yang secara langsung memengaruhi kemudahan petani memperoleh pupuk bersubsidi.

Marcelly et al (2025), menyatakan bahwa ketepatan tempat distribusi pupuk bersubsidi dipengaruhi oleh kemudahan akses petani terhadap kios pengecer resmi dan keterjangkauan lokasi distribusi. Semakin dekat lokasi kios dengan sentra produksi pertanian, semakin tinggi peluang petani memperoleh pupuk tepat waktu dan dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Ala et al (2025), menambahkan bahwa efektivitas distribusi sarana produksi pertanian tidak hanya ditentukan oleh jumlah pupuk yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas pelayanan distribusi yang mampu menjangkau seluruh petani penerima secara merata.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlunya mempertahankan sistem penempatan kios pengecer resmi yang telah berjalan baik sekaligus melakukan evaluasi terhadap wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses. Optimalisasi jaringan distribusi, terutama bagi petani yang berada pada lokasi dengan akses transportasi yang kurang memadai, akan mendukung peningkatan kualitas implementasi kebijakan

pupuk bersubsidi. Prinsip tepat tempat sendiri tidak hanya menjadi indikator administratif dalam penyaluran pupuk, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjamin kemudahan akses petani terhadap sarana produksi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlanjutan usahatani padi sawah.

### **Tepat Jenis**

Ketepatan jenis merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi karena menunjukkan kesesuaian antara jenis pupuk yang diterima petani dengan kebutuhan hara tanaman serta alokasi yang telah ditetapkan dalam sistem e-RDKK. Kesesuaian jenis pupuk menjadi faktor yang menentukan efektivitas program subsidi pupuk, mengingat setiap jenis pupuk memiliki kandungan unsur hara dan fungsi yang berbeda dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya ditujukan untuk memastikan pupuk tersedia bagi petani, tetapi juga menjamin bahwa jenis pupuk yang diterima sesuai dengan rekomendasi pemupukan bagi komoditas yang diusahakan. Implementasi indikator tepat jenis yang berjalan dengan baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk sekaligus mendukung peningkatan produktivitas usahatani padi sawah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, pupuk bersubsidi untuk subsektor tanaman pangan terdiri atas pupuk Urea dan pupuk NPK yang didistribusikan berdasarkan alokasi yang tercantum dalam e-RDKK. Kedua jenis pupuk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan unsur hara makro tanaman padi, sehingga keberhasilan distribusinya menjadi salah satu indikator penting dalam menilai implementasi kebijakan subsidi pupuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan jenis pupuk bersubsidi yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan usahatani padi sawah. Seluruh petani memperoleh pupuk Urea dan NPK sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam sistem e-RDKK, sehingga indikator tepat jenis pada implementasi distribusi pupuk bersubsidi di lokasi penelitian dapat dikategorikan telah terlaksana dengan sangat baik. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme penetapan jenis pupuk melalui sistem distribusi pemerintah telah mampu menjamin kesesuaian antara kebutuhan komoditas yang diusahakan dengan jenis pupuk yang diterima oleh petani.

Tingginya tingkat ketepatan jenis menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah, distributor, kios pengecer resmi, dan kelompok tani dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi telah berjalan secara efektif. Sistem e-RDKK yang menjadi dasar penetapan alokasi pupuk memungkinkan jenis pupuk yang disalurkan disesuaikan dengan komoditas yang diusahakan oleh petani, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan distribusi. Dari perspektif implementasi kebijakan publik, kondisi tersebut mencerminkan bahwa salah satu tujuan utama kebijakan subsidi pupuk, yaitu menjamin ketersediaan jenis pupuk yang sesuai bagi petani sasaran, telah tercapai dengan baik.

Kesesuaian jenis pupuk juga memberikan manfaat agronomis bagi usahatani padi sawah. Kombinasi pupuk Urea sebagai sumber nitrogen dan pupuk NPK sebagai penyedia unsur nitrogen, fosfor, dan kalium berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hara tanaman pada setiap fase pertumbuhan. Ketersediaan kedua jenis pupuk tersebut memungkinkan petani menerapkan pemupukan berimbang yang mendukung pertumbuhan vegetatif, pembentukan anakan, pengisian bulir, hingga peningkatan kualitas hasil panen. Keberhasilan implementasi indikator tepat jenis tidak hanya mencerminkan keberhasilan distribusi secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap efektivitas pemanfaatan pupuk dalam kegiatan budidaya. Keberhasilan indikator tepat jenis tidak serta-merta menjamin optimalnya hasil produksi apabila tidak diikuti dengan ketepatan jumlah, dosis, maupun waktu aplikasi pupuk. Dengan kata lain, implementasi prinsip enam tepat merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, sehingga keberhasilan pada satu indikator perlu didukung oleh keberhasilan indikator lainnya agar tujuan kebijakan subsidi pupuk dapat tercapai secara optimal. Evaluasi implementasi distribusi pupuk tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan keterkaitan antarindikator dalam prinsip enam tepat. Wijayanti et al (2024), menyatakan bahwa ketepatan jenis pupuk sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara jenis pupuk yang didistribusikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan pertanian. Maman et al (2021) juga, menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi yang mampu menyediakan jenis pupuk sesuai kebutuhan komoditas berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas program subsidi serta produktivitas usahatani padi sawah.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlunya mempertahankan sistem penetapan jenis pupuk berbasis e-RDKK yang telah berjalan dengan baik melalui pembaruan data petani secara berkala dan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, distributor, dan kios

pengecer resmi. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa kesesuaian jenis pupuk tetap terjaga seiring dengan perubahan kebutuhan budidaya maupun dinamika kebijakan subsidi pupuk di masa mendatang.

### **Tepat Harga**

Ketepatan harga merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjamin keterjangkauan harga pupuk bagi petani sesuai kebijakan subsidi yang telah ditetapkan. Subsidi pupuk pada dasarnya bertujuan mengurangi beban biaya produksi usahatani melalui penyediaan pupuk dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Implementasi indikator tepat harga tidak hanya diukur dari kesesuaian harga pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi bagi petani sebagai penerima subsidi. Keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi pada indikator ini diharapkan dapat meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi sekaligus memperkuat keberlanjutan usahatani padi sawah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai acuan resmi dalam penjualan pupuk bersubsidi di tingkat kios pengecer. Penetapan HET dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan harga selama proses distribusi serta menjamin bahwa pupuk bersubsidi dapat diperoleh petani sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian mengenai ketepatan harga pupuk bersubsidi di Desa Bente dan Desa Rangka disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ketepatan Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Bente dan Desa Rangka

| No.          | Alternatif Jawaban | Responden (Orang) | Persentase Ketepatan (%) |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1            | Tepat              | 44                | 78,6                     |
| 2            | Kurang Tepat       | 12                | 21,4                     |
| <b>Total</b> |                    | <b>56</b>         | <b>100,0</b>             |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2026.

Tabel 2, menunjukkan bahwa sebanyak 44 responden (78,57%) menyatakan harga pupuk bersubsidi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan 12 responden (21,43%) menilai harga pupuk masih kurang tepat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi distribusi pupuk bersubsidi pada indikator tepat harga secara umum telah berjalan dengan baik karena sebagian besar petani memperoleh pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan harga pada tingkat kios pengecer resmi telah berjalan secara efektif sehingga tidak ditemukan praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan.

Petani yang menyatakan harga pupuk telah tepat mengungkapkan bahwa harga pupuk Urea maupun NPK yang dibayarkan sesuai dengan HET tanpa adanya pungutan tambahan selama proses pennebusan. Kondisi tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi petani karena biaya pengadaan pupuk menjadi lebih rendah dibandingkan apabila harus membeli pupuk non-subsidi. Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama subsidi pupuk untuk meningkatkan keterjangkauan sarana produksi telah tercapai pada aspek kepatuhan terhadap regulasi harga. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan fenomena yang menarik. Sebagian responden tetap menganggap harga pupuk bersubsidi masih mahal meskipun harga yang mereka bayarkan telah sesuai dengan HET. Dengan kata lain, penilaian "kurang tepat" yang diberikan petani bukan disebabkan oleh adanya pelanggaran harga di tingkat kios pengecer, melainkan karena keterbatasan kemampuan ekonomi rumah tangga petani dalam memenuhi kebutuhan modal usahatani. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara keberhasilan implementasi kebijakan secara administratif dengan persepsi keterjangkauan ekonomi petani. Secara administratif, indikator tepat harga telah terpenuhi karena tidak ditemukan penyimpangan harga. Akan tetapi, dari sudut pandang petani, harga pupuk bersubsidi masih dianggap cukup membebani, terutama ketika kebutuhan pupuk meningkat atau pendapatan usahatani mengalami penurunan.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan subsidi pupuk tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kepatuhan terhadap HET, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi petani sebagai penerima manfaat. Bagi petani dengan skala usaha relatif kecil dan modal terbatas, harga pupuk yang secara administratif telah sesuai ketentuan belum tentu dipersepsikan sebagai harga yang benar-benar terjangkau. Evaluasi implementasi kebijakan subsidi pupuk sebaiknya tidak hanya berorientasi pada aspek regulatif, tetapi juga memperhatikan daya beli petani sebagai indikator keberhasilan kebijakan dalam

meningkatkan kesejahteraan pelaku usahatani. Tyas et al (2024), bahwa ketepatan harga pupuk bersubsidi berkaitan dengan kesesuaian harga terhadap ketentuan pemerintah sehingga pupuk dapat diakses oleh petani sesuai kebijakan yang berlaku. Selain itu, Pambudi et al (2025) menjelaskan bahwa kebijakan subsidi pupuk berperan dalam mengurangi biaya produksi usahatani, namun manfaat ekonomi yang dirasakan petani sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli dan kecukupan modal usahatani.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlunya pemerintah mempertahankan pengawasan terhadap penerapan HET di tingkat kios pengecer sekaligus memperkuat kebijakan pendukung yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi petani, seperti kemudahan akses pembiayaan usahatani, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan produktivitas melalui pendampingan penyuluhan. Manfaat kebijakan subsidi pupuk tidak hanya tercermin dari kepatuhan terhadap ketentuan harga, tetapi juga dari meningkatnya keterjangkauan sarana produksi bagi petani secara nyata.

### **Tepat Jumlah**

Ketepatan jumlah merupakan salah satu indikator yang paling menentukan keberhasilan implementasi distribusi pupuk bersubsidi karena berkaitan langsung dengan kemampuan petani memenuhi kebutuhan pemupukan sesuai luas lahan dan rekomendasi teknis budidaya. Berbeda dengan indikator lainnya yang lebih menekankan aspek administratif distribusi, indikator tepat jumlah berhubungan langsung dengan kecukupan input produksi yang digunakan dalam usahatani. Ketersediaan pupuk dalam jumlah yang sesuai memungkinkan petani menerapkan dosis pemupukan secara optimal sehingga kebutuhan hara tanaman dapat terpenuhi selama fase pertumbuhan. Sebaliknya, jumlah pupuk yang tidak mencukupi berpotensi menyebabkan petani mengurangi dosis pemupukan, menunda aplikasi pupuk, atau membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan biaya produksi dan memengaruhi produktivitas usahatani padi sawah.

Dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan data kebutuhan yang dihimpun melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara elektronik (e-RDKK). Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa jumlah pupuk yang diterima setiap petani sesuai dengan luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta ketentuan alokasi yang berlaku. Hasil penelitian mengenai ketepatan jumlah pupuk bersubsidi di Desa Bente dan Desa Rangka disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ketepatan Jumlah Pupuk Bersubsidi di Desa Bente dan Desa Rangka

| No.          | Alternatif Jawaban | Responden (Orang) | Persentase Ketepatan (%) |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1            | Tepat              | 25                | 44,6                     |
| 2            | Kurang Tepat       | 31                | 55,4                     |
| <b>Total</b> |                    | <b>56</b>         | <b>100,0</b>             |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2026.

Tabel 3, menunjukkan bahwa hanya 25 responden (44,64%) yang menyatakan jumlah pupuk bersubsidi yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan usahatani, sedangkan 31 responden (55,36%) menyatakan jumlah pupuk yang diterima masih belum mencukupi. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator tepat jumlah merupakan aspek implementasi distribusi pupuk bersubsidi yang masih menghadapi kendala paling besar dibandingkan indikator lainnya. Meskipun proses penyaluran pupuk telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah, alokasi pupuk yang diterima petani belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pemupukan berdasarkan luas lahan dan rekomendasi teknis budidaya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar petani menerima pupuk sesuai alokasi yang tercantum dalam sistem e-RDKK, namun jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pemupukan selama satu musim tanam. Akibatnya, petani melakukan berbagai bentuk penyesuaian, seperti mengurangi dosis pemupukan pada setiap aplikasi, membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi, atau memprioritaskan pemupukan pada sebagian petak lahan yang dianggap lebih produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada proses distribusi di tingkat kios pengecer, melainkan pada keterbatasan alokasi pupuk yang ditetapkan dalam sistem perencanaan.

Implementasi kebijakan subsidi pupuk telah berhasil menjamin keteraturan penyaluran, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin kecukupan kebutuhan pupuk di tingkat petani. Dari perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur distribusi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam memenuhi kebutuhan riil kelompok sasaran. Meskipun

distribusi pupuk telah dilakukan sesuai ketentuan administrasi, keterbatasan alokasi pupuk menyebabkan tujuan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas usahatani belum tercapai secara optimal.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah mekanisme penyusunan e-RDKK yang bergantung pada data usulan kelompok tani, luas lahan yang terdaftar, serta kebijakan alokasi pupuk secara nasional. Kebutuhan pupuk di tingkat petani sering kali lebih tinggi dibandingkan alokasi yang tersedia karena adanya variasi tingkat kesuburan tanah, intensitas tanam, dan kondisi agroekosistem yang berbeda antar wilayah. Akibatnya, alokasi pupuk yang diterima petani belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual di lapangan. Pentingnya penyempurnaan sistem perencanaan kebutuhan pupuk melalui pembaruan data e-RDKK secara berkala dan penerapan rekomendasi pemupukan yang lebih spesifik lokasi (*site-specific nutrient management*), sehingga alokasi pupuk bersubsidi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan riil usahatani.

Keterbatasan jumlah pupuk bersubsidi juga berimplikasi terhadap perilaku pemupukan petani. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka mengurangi dosis pemupukan agar pupuk yang tersedia dapat digunakan hingga akhir musim tanam. Praktik tersebut berpotensi menurunkan efisiensi pemupukan karena tanaman tidak memperoleh unsur hara sesuai rekomendasi. Di sisi lain, petani yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik cenderung membeli pupuk non-subsidi untuk menutupi kekurangan tersebut, sedangkan petani dengan modal terbatas lebih memilih tetap menggunakan pupuk sesuai alokasi yang tersedia meskipun jumlahnya kurang. Perbedaan kemampuan ekonomi ini menunjukkan bahwa dampak keterbatasan alokasi pupuk tidak dirasakan secara merata oleh seluruh petani.

Sari et al (2024), bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk saat ini bukan lagi pada mekanisme penyaluran, melainkan pada kecukupan alokasi pupuk yang diterima petani. Kharisma et al (2024) juga, menjelaskan bahwa keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi menyebabkan petani melakukan penyesuaian dosis pemupukan atau membeli pupuk non-subsidi untuk mempertahankan produktivitas usahatani. Selain itu, Widyastutik et al (2022) menegaskan bahwa efektivitas program subsidi pupuk akan lebih optimal apabila penetapan kebutuhan pupuk didasarkan pada kondisi spesifik lokasi, karakteristik lahan, dan kebutuhan hara tanaman, bukan semata-mata pada alokasi administratif.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan efektivitas kebijakan subsidi pupuk tidak cukup dilakukan melalui perbaikan sistem distribusi, tetapi juga memerlukan penyempurnaan mekanisme penentuan alokasi pupuk. Pemerintah perlu memperkuat validasi data e-RDKK, meningkatkan akurasi pendataan luas lahan, serta mengintegrasikan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi dalam penyusunan kebutuhan pupuk. Di sisi lain, penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam mendampingi petani menyusun kebutuhan pupuk secara lebih akurat dan mendorong penerapan pemupukan berimbang agar pupuk yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Indikator tepat jumlah tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usahatani padi sawah.

### **Tepat Waktu**

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi karena berkaitan dengan ketersediaan pupuk pada saat dibutuhkan dalam kegiatan budidaya. Dalam usahatani padi sawah, waktu aplikasi pupuk memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap efektivitas penyerapan unsur hara oleh tanaman. Oleh karena itu, keberhasilan distribusi pupuk tidak hanya diukur dari tersalurkannya pupuk kepada petani, tetapi juga dari kemampuan sistem distribusi menyediakan pupuk sebelum atau pada saat jadwal pemupukan yang direkomendasikan. Keterlambatan distribusi dapat menyebabkan petani menunda pemupukan, mengubah jadwal aplikasi, atau menggunakan pupuk alternatif yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efisiensi pemupukan dan memengaruhi produktivitas usahatani padi sawah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan mampu menjamin ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan musim tanam sehingga petani dapat melakukan pemupukan secara tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian terhadap petani padi sawah di Desa Bente dan Desa Rangka, tingkat ketepatan waktu distribusi pupuk bersubsidi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Ketepatan Waktu Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Bente dan Desa Rangka

| No.   | Alternatif Jawaban | Responden (Orang) | Persentase Ketepatan (%) |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1     | Tepat              | 40                | 71,4                     |
| 2     | Kurang Tepat       | 16                | 28,6                     |
| Total |                    | 56                | 100,0                    |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2026.

Tabel 4, menunjukkan bahwa sebanyak 40 responden (71,43%) menyatakan pupuk bersubsidi diterima pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan musim tanam, sedangkan 16 responden (28,57%) menyatakan pupuk tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi distribusi pupuk bersubsidi pada indikator tepat waktu telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala yang memengaruhi sebagian petani dalam memperoleh pupuk sesuai jadwal pemupukan.

Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa pupuk bersubsidi umumnya tersedia di kios pengecer pada awal musim tanam sehingga proses penyesuaian dapat dilakukan sebelum kegiatan pemupukan dimulai. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi petani karena mereka dapat menyusun jadwal pemupukan sesuai rekomendasi budidaya tanpa harus menunggu ketersediaan pupuk. Dari perspektif implementasi kebijakan, ketersediaan pupuk pada saat dibutuhkan menunjukkan bahwa koordinasi antara distributor, kios pengecer resmi, dan kelompok tani telah berjalan cukup efektif dalam menjaga kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Meskipun demikian, hampir sepertiga responden menyatakan bahwa pupuk tidak selalu tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut umumnya terjadi ketika permintaan pupuk meningkat secara bersamaan pada awal musim tanam atau ketika terjadi keterlambatan pengiriman dari distributor ke kios pengecer. Akibatnya, sebagian petani harus menunggu beberapa hari hingga pupuk kembali tersedia. Keterlambatan tersebut menyebabkan jadwal pemupukan bergeser dari waktu yang telah direncanakan sehingga sebagian petani memilih menunda aplikasi pupuk, sedangkan petani yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik membeli pupuk non-subsidi agar kegiatan budidaya tetap berjalan sesuai jadwal.

Ketepatan waktu distribusi memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pemanfaatan pupuk di tingkat usahatani. Meskipun jenis, harga, dan sasaran distribusi telah sesuai dengan ketentuan, keterlambatan penyaluran tetap dapat mengurangi efektivitas program subsidi karena pupuk tidak tersedia pada fase pertumbuhan tanaman yang membutuhkan unsur hara secara optimal. Dalam budidaya padi sawah, keterlambatan pemupukan, terutama pada fase vegetatif awal, dapat memengaruhi pembentukan anakan produktif dan pada akhirnya berdampak terhadap hasil panen. Indikator tepat waktu tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif distribusi, tetapi juga memiliki konsekuensi agronomis terhadap keberhasilan produksi. Ketepatan waktu memiliki keterkaitan yang erat dengan indikator tepat jumlah. Pada beberapa kasus, keterlambatan distribusi terjadi bersamaan dengan terbatasnya alokasi pupuk sehingga petani tidak hanya menghadapi masalah waktu penyaluran, tetapi juga keterbatasan jumlah pupuk yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan subsidi pupuk dipengaruhi oleh keterpaduan antar indikator dalam prinsip enam tepat. Keberhasilan pada satu indikator belum tentu mampu menjamin keberhasilan keseluruhan apabila masih terdapat kendala pada indikator lainnya.

Nuryanti et al (2023), menyatakan bahwa ketepatan waktu distribusi pupuk merupakan faktor penting dalam menjamin keberhasilan pemupukan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan. Srisri et al (2024) juga, menunjukkan bahwa keterlambatan distribusi pupuk menyebabkan petani menyesuaikan jadwal pemupukan atau menggunakan pupuk alternatif sehingga efisiensi pemupukan menjadi berkurang. Kelancaran distribusi pupuk sebelum musim tanam merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan subsidi pupuk.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan kios pengecer resmi dalam menyusun jadwal distribusi berdasarkan kalender tanam di masing-masing wilayah. Selain itu, sistem monitoring stok pupuk secara berkala perlu diperkuat agar potensi kekosongan pupuk pada awal musim tanam dapat diantisipasi lebih dini. Penyesuaian jadwal distribusi dengan pola tanam petani akan meningkatkan ketepatan waktu penyaluran sehingga pupuk dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan tanaman.

### Tepat Sasaran Penerima

Ketepatan sasaran merupakan indikator utama dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk karena menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan publik, subsidi pupuk dirancang untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara. Distribusi pupuk bersubsidi harus diarahkan kepada petani yang memenuhi persyaratan administratif, seperti terdaftar dalam kelompok tani, memiliki lahan yang diusahakan, serta tercantum dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Ketepatan sasaran menjadi indikator yang sangat penting karena keberhasilan distribusi tidak hanya ditentukan oleh kelancaran penyaluran pupuk, tetapi juga oleh kemampuan sistem untuk memastikan bahwa manfaat subsidi diterima oleh kelompok yang benar-benar berhak.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, penetapan penerima pupuk bersubsidi dilakukan melalui mekanisme pendataan yang terintegrasi dalam sistem e-RDKK. Sistem tersebut dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data petani, memperkuat transparansi distribusi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan pupuk bersubsidi telah diterima oleh petani yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh petani penerima merupakan anggota kelompok tani yang telah terdaftar dalam sistem e-RDKK, sehingga proses penyaluran pupuk dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi distribusi pupuk bersubsidi pada indikator tepat sasaran telah terlaksana dengan sangat baik dan mencerminkan efektivitas mekanisme penetapan penerima manfaat di lokasi penelitian.

Keberhasilan indikator tepat sasaran tidak terlepas dari penerapan sistem e-RDKK sebagai dasar penetapan alokasi pupuk bersubsidi. Melalui sistem tersebut, data petani, luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta kebutuhan pupuk dihimpun dan diverifikasi secara berjenjang sebelum ditetapkan sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas distribusi karena hanya petani yang memenuhi persyaratan administratif yang dapat melakukan penembusan pupuk di kios pengecer resmi. Digitalisasi pendataan melalui e-RDKK telah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kesalahan sasaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Keberhasilan ketepatan sasaran selain dukungan sistem administrasi, juga dipengaruhi oleh peran aktif kelompok tani dan penyuluh pertanian. Kelompok tani berperan dalam menghimpun dan memperbarui data anggotanya, sedangkan penyuluh melakukan pendampingan dalam penyusunan e-RDKK, verifikasi data, serta sosialisasi mengenai persyaratan penerima pupuk bersubsidi. Sinergi antara petani, kelompok tani, penyuluh, dan pemerintah daerah menciptakan mekanisme distribusi yang lebih tertib dan meminimalkan potensi penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan subsidi pupuk tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga pada kualitas kelembagaan yang mendukung pelaksanaannya di tingkat lapangan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketepatan sasaran belum secara otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk petani. Sebagaimana dibahas pada indikator tepat jumlah, sebagian besar responden masih menilai bahwa alokasi pupuk yang diterima belum mencukupi kebutuhan usahatani. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menentukan sasaran penerima subsidi perlu diikuti oleh kebijakan yang mampu menjamin kecukupan alokasi pupuk. Efektivitas implementasi kebijakan subsidi pupuk tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima subsidi, tetapi juga oleh sejauh mana subsidi tersebut mampu memenuhi kebutuhan riil petani dalam kegiatan budidaya.

Cahyani et al (2025), menyatakan bahwa penerapan sistem e-RDKK mampu meningkatkan akurasi data penerima pupuk bersubsidi sehingga mengurangi potensi kesalahan sasaran dalam proses distribusi. Sari et al (2025) juga, menjelaskan bahwa keterlibatan kelompok tani dan penyuluh pertanian merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan subsidi pupuk melalui proses pendataan, verifikasi, dan pengawasan distribusi. Integrasi antara sistem digital dan kelembagaan petani menjadi fondasi utama dalam mewujudkan distribusi pupuk yang tepat sasaran.

Sudut pandang implementasi kebijakan publik, keberhasilan indikator tepat sasaran menunjukkan bahwa reformasi tata kelola distribusi pupuk melalui digitalisasi pendataan telah memberikan hasil yang positif. Namun demikian, keberhasilan tersebut perlu dipertahankan melalui pembaruan data petani secara berkala, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengelolaan e-RDKK, serta penguatan fungsi penyuluh pertanian dalam melakukan verifikasi dan pendampingan. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi tetap adaptif terhadap perubahan kondisi usahatani dan dinamika jumlah petani penerima manfaat.

### **Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada Usahatani Padi Sawah**

Pemanfaatan pupuk bersubsidi merupakan tahapan lanjutan setelah proses distribusi yang menentukan sejauh mana kebijakan subsidi pupuk mampu memberikan manfaat nyata bagi kegiatan usahatani. Keberhasilan distribusi pupuk berdasarkan prinsip enam tepat belum sepenuhnya menjamin tercapainya peningkatan produktivitas apabila pupuk yang telah diterima tidak digunakan sesuai dengan rekomendasi teknis budidaya. Efektivitas kebijakan subsidi pupuk tidak hanya ditentukan oleh kelancaran proses penyaluran, tetapi juga oleh ketepatan petani dalam memanfaatkan pupuk pada kegiatan budidaya padi sawah (Hardi et al., 2023).

Pemanfaatan pupuk bersubsidi mencakup beberapa aspek penting, yaitu kesesuaian jenis pupuk, dosis pemupukan, dan waktu aplikasi. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan efisiensi penggunaan pupuk dan kemampuan tanaman menyerap unsur hara secara optimal (Mansyur et al., 2021). Penggunaan jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, dosis yang mengikuti rekomendasi pemupukan, serta aplikasi pada fase pertumbuhan yang tepat akan meningkatkan efektivitas pemupukan dan mendukung produktivitas usahatani. Sebaliknya, penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan rekomendasi dapat menyebabkan rendahnya efisiensi pemupukan, pemborosan biaya produksi, serta berpotensi menurunkan hasil panen.

Pemanfaatan pupuk bersubsidi dalam usahatani padi sawah di Desa Bente dan Desa Rangka dianalisis berdasarkan tiga indikator utama, yaitu kesesuaian jenis pupuk yang digunakan, kesesuaian dosis pemupukan, dan ketepatan waktu aplikasi pupuk. Analisis terhadap ketiga indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi oleh petani setelah pupuk diterima melalui mekanisme distribusi pemerintah.

#### **Kesesuaian Jenis Pupuk**

Kesesuaian jenis pupuk merupakan indikator awal dalam menilai pemanfaatan pupuk bersubsidi karena berkaitan dengan kemampuan petani menggunakan jenis pupuk sesuai dengan kebutuhan hara tanaman padi. Setiap jenis pupuk memiliki kandungan unsur hara yang berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan karakteristik tanaman dan rekomendasi pemupukan. Pada budidaya padi sawah, pupuk Urea berfungsi sebagai sumber nitrogen untuk mendukung pertumbuhan vegetatif, sedangkan pupuk NPK menyediakan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang berperan dalam perkembangan akar, pembentukan anakan, serta pengisian bulir. Penggunaan kedua jenis pupuk tersebut secara berimbang menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pemupukan dan produktivitas tanaman.

Evaluasi terhadap kesesuaian jenis pupuk tidak hanya menunjukkan tingkat kepatuhan petani terhadap rekomendasi pemupukan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai keberhasilan implementasi distribusi pupuk bersubsidi pada indikator tepat jenis. Apabila jenis pupuk yang diterima melalui sistem distribusi sesuai dengan jenis pupuk yang digunakan petani dalam kegiatan budidaya, maka dapat dikatakan bahwa proses distribusi telah mendukung praktik pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menggunakan kombinasi pupuk Urea dan NPK dalam kegiatan budidaya padi sawah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pupuk bersubsidi pada indikator kesesuaian jenis telah berjalan dengan sangat baik. Seluruh petani memanfaatkan jenis pupuk yang sesuai dengan rekomendasi budidaya maupun jenis pupuk yang disalurkan melalui program subsidi pemerintah. Kondisi tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara implementasi distribusi pupuk dan praktik pemupukan yang dilakukan petani di tingkat usahatani.

Penggunaan pupuk Urea dan NPK secara bersamaan menunjukkan bahwa petani telah memahami pentingnya pemupukan berimbang dalam memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Pupuk Urea menyediakan nitrogen yang berperan dalam pembentukan daun dan anakan, sedangkan pupuk NPK melengkapi kebutuhan fosfor dan kalium yang diperlukan untuk perkembangan sistem perakaran, pembungaan, serta pembentukan gabah. Kombinasi kedua jenis pupuk tersebut mendukung pertumbuhan tanaman secara lebih optimal dibandingkan penggunaan satu jenis pupuk saja.

Keberhasilan pemanfaatan jenis pupuk juga dipengaruhi oleh peran penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan mengenai rekomendasi pemupukan. Melalui kegiatan penyuluhan, petani memperoleh informasi mengenai fungsi masing-masing jenis pupuk, manfaat pemupukan berimbang, serta cara penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain itu, pengalaman berusaha yang dimiliki responden turut berkontribusi terhadap pemahaman mereka dalam memilih jenis pupuk yang tepat. Kombinasi antara pendampingan penyuluh dan pengalaman praktis tersebut menjadi faktor yang mendukung tingginya tingkat kesesuaian penggunaan jenis pupuk di lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara implementasi distribusi pupuk dan pemanfaatannya di tingkat petani. Sebagaimana dibahas pada indikator tepat jenis, seluruh responden menerima pupuk Urea dan NPK sesuai dengan alokasi e-RDCK. Kondisi tersebut memudahkan petani untuk menerapkan pemupukan sesuai rekomendasi karena jenis pupuk yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan budidaya. Keberhasilan distribusi pada indikator tepat jenis memberikan kontribusi langsung terhadap keberhasilan pemanfaatan pupuk pada usahatani padi sawah. Susilowati & Kusumo (2019), bahwa penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan unsur hara tanaman merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan efisiensi pemupukan dan produktivitas tanaman. Solihin et al (2025), bahwa pemupukan berimbang melalui kombinasi pupuk nitrogen dan pupuk majemuk mampu meningkatkan efisiensi penggunaan hara serta mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

Mempertahankan ketersediaan pupuk Urea dan NPK dalam program subsidi pemerintah sesuai dengan kebutuhan petani padi sawah sangat perlu dilakukan. Selain itu, kegiatan penyuluhan mengenai pemupukan berimbang perlu terus ditingkatkan agar pemanfaatan pupuk tidak hanya sesuai dari sisi jenis, tetapi juga diikuti dengan ketepatan dosis dan waktu aplikasi. Upaya tersebut akan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk bersubsidi sekaligus mendukung peningkatan produktivitas usahatani secara berkelanjutan.

### **Kesesuaian Dosis Pemupukan**

Kesesuaian dosis pemupukan merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi pada usahatani padi sawah. Dosis pupuk yang tepat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hara tanaman sehingga mampu mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan hasil secara optimal. Sebaliknya, penggunaan pupuk dengan dosis yang lebih rendah atau lebih tinggi dari rekomendasi dapat menurunkan efisiensi pemupukan, meningkatkan biaya produksi, serta berpotensi mengurangi produktivitas maupun kualitas hasil panen. Pemanfaatan pupuk bersubsidi tidak hanya diukur dari ketersediaan pupuk, tetapi juga dari kemampuan petani menerapkan dosis pemupukan sesuai rekomendasi teknis.

Rekomendasi dosis pemupukan pada tanaman padi disusun berdasarkan kebutuhan unsur hara tanaman, kondisi lahan, serta target produktivitas yang ingin dicapai. Keputusan petani mengenai dosis pupuk sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman berusahatani, kemampuan ekonomi, ketersediaan pupuk, serta intensitas pendampingan dari penyuluh pertanian. Hasil penelitian mengenai kesesuaian dosis pemupukan pada usahatani padi sawah di Desa Bente dan Desa Rangka disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kesesuaian Dosis Pemupukan pada Usahatani Padi Sawah di Desa Bente dan Desa Rangka

| No.          | Kategori Jawaban | Responden (Orang) | Persentase (%) |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1            | Sesuai           | 39                | 69,6           |
| 2            | Kurang Sesuai    | 17                | 30,4           |
| <b>Total</b> |                  | <b>56</b>         | <b>100,0</b>   |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2026.

Tabel 5, menunjukkan bahwa sebanyak 39 responden (69,64%) telah menerapkan dosis pemupukan sesuai dengan rekomendasi, sedangkan 17 responden (30,36%) masih menggunakan dosis yang belum sesuai. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani telah memanfaatkan pupuk bersubsidi secara relatif tepat dari aspek dosis. Namun demikian, masih terdapat hampir sepertiga responden yang belum menerapkan dosis sesuai rekomendasi, sehingga efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi di lokasi penelitian belum sepenuhnya optimal.

Petani yang menerapkan dosis sesuai rekomendasi umumnya memperoleh informasi melalui kegiatan penyuluhan, pengalaman mengikuti sekolah lapang, maupun arahan kelompok tani. Mereka memahami bahwa kebutuhan unsur hara tanaman harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan dan kondisi lahan agar pupuk dapat dimanfaatkan secara efisien. Penerapan dosis yang sesuai tidak hanya meningkatkan peluang tercapainya produktivitas yang optimal, tetapi juga membantu mengurangi pemborosan penggunaan pupuk dan menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Sebaliknya, responden yang belum menerapkan dosis sesuai rekomendasi umumnya menentukan jumlah pupuk berdasarkan pengalaman berusahatani atau kebiasaan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Beberapa petani mengurangi dosis pupuk karena jumlah pupuk bersubsidi yang diterima belum mencukupi kebutuhan lahan yang diusahakan, sementara sebagian lainnya menyesuaikan

dosis dengan kemampuan modal yang dimiliki untuk membeli tambahan pupuk non-subsidi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan petani mengenai dosis pemupukan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan teknis, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan ketersediaan pupuk di lapangan.

Temuan ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara indikator tepat jumlah pada distribusi pupuk dengan kesesuaian dosis pemupukan. Lebih dari separuh responden menyatakan bahwa jumlah pupuk bersubsidi yang diterima belum memenuhi kebutuhan usahatani. Keterbatasan tersebut mendorong sebagian petani untuk mengurangi dosis pemupukan agar pupuk yang tersedia dapat digunakan hingga akhir musim tanam. Dengan demikian, ketidaksesuaian dosis bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya pengetahuan petani, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi terhadap keterbatasan jumlah pupuk yang diterima melalui program subsidi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan pupuk sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi distribusinya.

Intensitas pendampingan penyuluh pertanian selain faktor ketersediaan pupuk, juga berperan penting dalam membentuk perilaku pemupukan petani. Penyuluh tidak hanya memberikan informasi mengenai rekomendasi dosis pupuk, tetapi juga membantu petani memahami pentingnya pemupukan berimbang berdasarkan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Pendampingan yang berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan petani dalam mengambil keputusan pemupukan yang lebih rasional, sehingga penggunaan pupuk menjadi lebih efisien dan produktivitas usahatani dapat ditingkatkan.

Penerapan dosis pupuk yang sesuai juga berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan input dan pelestarian kualitas lingkungan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Penggunaan pupuk secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kehilangan unsur hara melalui pencucian (*leaching*) maupun limpasan permukaan (*runoff*), sedangkan penggunaan pupuk di bawah rekomendasi dapat menyebabkan tanaman mengalami kekurangan hara sehingga produktivitas tidak mencapai potensi optimal. Oleh karena itu, penerapan dosis yang tepat menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan sistem budidaya yang produktif sekaligus ramah lingkungan. Barus et al (2025), bahwa dosis pemupukan harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan agar efisiensi penggunaan unsur hara dapat tercapai. Bachtiar et al (2020) juga, menunjukkan bahwa penerapan dosis pupuk berdasarkan rekomendasi mampu meningkatkan efisiensi pemupukan, memperbaiki serapan hara tanaman, dan meningkatkan produktivitas padi sawah. Di sisi lain, Ansyah et al (2025) menjelaskan bahwa keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi sering menjadi penyebab petani melakukan penyesuaian dosis pemupukan di lapangan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan kualitas pendampingan penyuluh pertanian dalam menyusun rekomendasi pemupukan berdasarkan kondisi spesifik lokasi serta memperkuat pemahaman petani mengenai pentingnya penerapan dosis yang sesuai. Di sisi lain, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap alokasi pupuk bersubsidi agar jumlah pupuk yang diterima petani lebih mendekati kebutuhan riil di lapangan. Sinergi antara perbaikan sistem distribusi dan peningkatan kapasitas petani dalam pemupukan akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi sekaligus mendukung produktivitas usahatani padi sawah secara berkelanjutan.

### **Ketepatan Waktu Aplikasi Pupuk**

Ketepatan waktu aplikasi pupuk merupakan salah satu indikator penting dalam pemanfaatan pupuk bersubsidi karena berkaitan dengan efektivitas penyerapan unsur hara oleh tanaman padi pada setiap fase pertumbuhannya. Pemberian pupuk pada waktu yang sesuai memungkinkan tanaman memperoleh unsur hara sesuai kebutuhan fisiologisnya sehingga pertumbuhan vegetatif, pembentukan anakan, hingga pengisian bulir dapat berlangsung secara optimal. Sebaliknya, keterlambatan maupun percepatan aplikasi pupuk dapat menurunkan efisiensi pemanfaatan unsur hara, mengurangi respons tanaman terhadap pemupukan, dan pada akhirnya memengaruhi produktivitas usahatani. Keberhasilan pemanfaatan pupuk bersubsidi tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian jenis dan dosis pupuk, tetapi juga oleh ketepatan waktu aplikasinya di lapangan.

Pada budidaya padi sawah, jadwal aplikasi pupuk umumnya mengikuti fase pertumbuhan tanaman yang telah direkomendasikan, yaitu pada fase awal pertumbuhan, fase pembentukan anakan, dan fase menjelang pembentukan malai. Penerapan waktu aplikasi yang sesuai sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pupuk pada saat dibutuhkan, pengetahuan petani mengenai teknik pemupukan, serta pendampingan yang diberikan oleh penyuluh pertanian. Hasil penelitian mengenai ketepatan waktu aplikasi pupuk di Desa Bente dan Desa Rangka disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kesesuaian Dosis Pemupukan pada Usahatani Padi Sawah di Desa Bente dan Desa Rangka

| No.          | Kategori Jawaban | Responden (Orang) | Persentase (%) |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1            | Sesuai           | 43                | 76,8           |
| 2            | Kurang Sesuai    | 13                | 23,2           |
| <b>Total</b> |                  | <b>56</b>         | <b>100,0</b>   |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2026.

Tabel 6, menunjukkan bahwa sebanyak 43 responden (76,79%) telah melakukan aplikasi pupuk sesuai dengan waktu yang direkomendasikan, sedangkan 13 responden (23,21%) belum menerapkan waktu aplikasi secara tepat. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani telah memanfaatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan jadwal pemupukan yang dianjurkan, meskipun masih terdapat sebagian petani yang melakukan aplikasi pupuk di luar waktu yang direkomendasikan. Secara umum, hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan pupuk bersubsidi pada indikator ketepatan waktu telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan upaya perbaikan agar efektivitas pemupukan dapat ditingkatkan.

Petani yang melakukan aplikasi pupuk sesuai rekomendasi umumnya telah memahami pentingnya pemberian pupuk pada fase pertumbuhan tanaman yang membutuhkan unsur hara dalam jumlah tinggi. Mereka melakukan pemupukan pertama pada fase awal pertumbuhan untuk merangsang pembentukan akar dan anakan, kemudian melanjutkan pemupukan pada fase pertumbuhan berikutnya sesuai kebutuhan tanaman. Praktik tersebut menunjukkan bahwa petani tidak hanya memiliki akses terhadap pupuk bersubsidi, tetapi juga telah mampu memanfaatkan pupuk secara lebih efektif berdasarkan rekomendasi teknis budidaya. Sebaliknya, responden yang belum menerapkan waktu aplikasi secara tepat umumnya mengalami keterlambatan dalam melakukan pemupukan. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan memperoleh pupuk bersubsidi, keterbatasan tenaga kerja pada saat musim tanam berlangsung, serta penyesuaian jadwal pemupukan dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air irigasi. Dalam beberapa kasus, petani memilih menunda pemupukan hingga pupuk tersedia atau hingga kondisi lahan memungkinkan untuk dilakukan aplikasi. Keputusan tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi lapangan, meskipun berpotensi mengurangi efektivitas penyerapan unsur hara oleh tanaman.

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara indikator tepat waktu dalam distribusi pupuk dengan ketepatan waktu aplikasi pupuk di tingkat petani. Masih terdapat petani yang mengalami keterlambatan memperoleh pupuk bersubsidi pada awal musim tanam. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap jadwal aplikasi pupuk karena petani tidak dapat melakukan pemupukan sesuai waktu yang telah direncanakan. Efektivitas pemanfaatan pupuk sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi pupuk.

Tingkat pengetahuan petani dan pendampingan penyuluh pertanian juga berperan penting dalam menentukan ketepatan waktu aplikasi pupuk. Penyuluh berfungsi memberikan informasi mengenai fase-fase kritis pertumbuhan tanaman yang memerlukan pemupukan, sekaligus mendampingi petani dalam menyusun jadwal budidaya yang sesuai dengan kalender tanam. Pendampingan tersebut menjadi semakin penting pada kondisi ketika terjadi perubahan pola musim atau keterlambatan distribusi pupuk, sehingga petani dapat mengambil keputusan pemupukan yang tetap efektif berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Ketepatan waktu aplikasi pupuk berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi serapan unsur hara oleh tanaman. Pemupukan yang dilakukan sesuai fase pertumbuhan akan meningkatkan kemampuan tanaman memanfaatkan nitrogen, fosfor, dan kalium secara optimal, sehingga pertumbuhan vegetatif dan pembentukan hasil berlangsung lebih baik. Sebaliknya, aplikasi pupuk yang terlambat menyebabkan sebagian kebutuhan hara tanaman tidak terpenuhi pada fase kritis, sedangkan aplikasi yang terlalu awal meningkatkan risiko kehilangan unsur hara akibat pencucian atau penguapan. Ketepatan waktu aplikasi menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan pemupukan yang efisien dan berkelanjutan. Kustanto et al (2025), menjelaskan bahwa waktu aplikasi pupuk harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman agar efisiensi pemanfaatan unsur hara dapat dimaksimalkan. Kasno (2019) juga, menunjukkan bahwa ketepatan waktu pemupukan berpengaruh nyata terhadap peningkatan produktivitas padi melalui peningkatan efisiensi serapan hara. Selain itu, Srisri et al (2024) melaporkan bahwa keterlambatan distribusi pupuk sering kali berdampak pada mundurnya jadwal pemupukan petani, sehingga efektivitas penggunaan pupuk menjadi menurun.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, kios pengecer, penyuluh pertanian, dan kelompok tani agar distribusi pupuk dapat diselaraskan dengan kalender tanam di setiap wilayah. Selain itu, penyuluhan mengenai manajemen pemupukan perlu terus

ditingkatkan agar petani memiliki kemampuan menyesuaikan waktu aplikasi berdasarkan fase pertumbuhan tanaman dan kondisi lapangan. Pemanfaat pupuk bersubsidi tidak hanya tercermin dari kemudahan akses terhadap pupuk, tetapi juga dari meningkatnya efisiensi pemanfaatan pupuk yang berkontribusi terhadap produktivitas dan keberlanjutan usahatani padi sawah.

## KESIMPULAN

Implementasi distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat di Desa Bente dan Desa Rangka secara umum telah berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu, dan tepat sasaran, sedangkan indikator tepat jumlah masih menjadi kendala utama karena alokasi pupuk belum memenuhi kebutuhan riil petani. Kondisi ini berdampak pada penyesuaian dosis pemupukan oleh sebagian petani. Meskipun demikian, pemanfaatan pupuk bersubsidi menunjukkan hasil yang relatif baik karena sebagian besar petani telah menggunakan jenis, dosis, dan waktu aplikasi sesuai rekomendasi. Peningkatan efektivitas kebijakan subsidi pupuk memerlukan penyempurnaan alokasi berbasis kebutuhan spesifik lokasi, pembaruan data e-RDKK, serta penguatan pendampingan penyuluh dalam penerapan pemupukan berimbang.

## REFERENSI

- Afandi, A., Novpriansyah, H., Afianti, N. A., & Prasetyo, D. (2026). Sosialisasi Pemupukan Tepat Berbasis Analisis Tanah Pada Tanaman Padi Sawah Di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 5(1), 111-124.
- Ala, R. Y. K., & Retang, E. U. K. (2025). Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi Pada Petani Padi Sawah Di Desa Palakahambi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. In *Prosiding Seminar Nasional SATI* (Vol. 4, No. 1, pp. 536-548).
- Anut, T. R. R., Therik, J. J., Benyamin, R. A., & Pandie, A. Y. (2026). Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang: Studi Kelompok Tani Harapan Kona. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 1114-1125. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.6284>
- Ansyah, A., Marzuki, S. N., & Masyhuri, M. (2025). Analisis Kelangkaan Pupuk Pertanian Bagi Petani Terhadap Produktivitas Dan Kesejahteraan Dari Pandangan Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 822-832.
- Arifin, Z. (2021). Teknik Cepat Uji Tanah Untuk Menentukan Rekomendasi Pemupukan Spesifik Lokasi Di Desa Sentul Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5(3), 1012-1023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna. (2024). *Kecamatan Kabawo dalam angka 2024*. Raha: BPS Kabupaten Muna.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Struktur ongkos usahatani padi*. Jakarta: BPS.
- Bachtar, T., Robifahmi, N., Flatian, A. N., Slamet, S., & Citraresmini, A. (2020). Pengaruh dan kontribusi pupuk kandang terhadap N total, serapan N (15N), dan hasil padi sawah (Oryzae Sativa L.) Varietas Mira-1. *Indonesian Journal of Nuclear Science and Technology*, 21(1), 35-48.
- Barus, A. S. B., Hutagalung, N. A., Syarovy, M., & Fauzi, W. R. (2025). Teknik Pemupukan Tanaman Menghasilkan Kelapa Sawit Menggunakan Prinsip Empat Tepat (4T). *WARTA Pusat Penelitian Kelapa Sawit*, 30(1), 23-38. <https://doi.org/10.22302/iopri.war.warta.v30i1.129>
- Cahyani, P. D., Widiyanto, M. K., & Ismail, H. (2025). Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Nganjuk Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Public Sphere Review*, 63-76.
- Hardi, D. J., Sutikno, T. D., & Sidhi, E. Y. (2023). Efektivitas Fasilitasi Penyediaan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Manggarai Timur Untuk Usahatani Padi Sawah. *Jintan: Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional*, 3(1), 1-12.

- Kasno, A. (2019). Perbaikan tanah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan berimbang dan produktivitas lahan kering masam. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 13(1), 27-40.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kharisma, N., Adinugraha, H. H., & Shultoni, M. (2024). Implikasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Pada Produktivitas Hasil Panen Tanaman Padi Di Sokduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan. *Strategic Journal of Management Sciences*, 4(2).
- Kustanto, H., Wahyudi, M. I., Fachriyan, H. A., & Subandoro, R. (2025). Studi Jenis dan Waktu Aplikasi Pupuk Organik dan ZPT Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi. *Agritrop: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)*, 23(1), 25-34. <https://doi.org/10.32528/agritrop.v23i1.3208>
- Makhtunin, V. (2025). Evaluasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2024 di Kabupaten Jombang. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(1), 13-23.
- Maman, U., Aminudin, I., & Novriana, E. (2021). Efektifitas pupuk bersubsidi terhadap peningkatan produktivitas padi sawah. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(2), 176-196. <https://dx.doi.org/10.33512/jat.v14i2.13268>
- Mansyur, N. I., Pudjiwati, E. H., & Murtalaksono, A. (2021). *Pupuk dan pemupukan*. Syiah Kuala University Press.
- Marcelly, S. W., Aromatica, D., & Koeswara, H. (2025). Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kota Padang: Sebuah Evaluasi Menyeluruh terhadap Distribusi dan Dampaknya. *Journal of Syntax Literate*, 10(8).
- Nuryanti, T., Milla, A. N., & Astutiningsih, E. T. (2023). Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Tingkat Petani di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)*, 6(1), 162-176. <https://doi.org/10.52434/mja.v6i1.2421>
- Paiman, P., Ardiyanta, A., Kusumastuti, C., Gunawan, S., & Ardiani, F. (2021). Maximizing the rice yield (*Oryza sativa* L.) using NPK fertilizer. *The Open Agriculture Journal*, 15(1), 33-38. <http://dx.doi.org/10.2174/1874331502115010033>
- Pambudi, A. S., Umar, H., & Wulandari, S. S. (2025). Evaluasi tata kelola subsidi pupuk untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(2), 1799-1818. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.310>
- Rozci, F., & Rizkiyah, N. (2024). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Implementasi dan Peningkatan: Fertilizer Subsidies: Policy, Implementation, and Improvement. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 12(1), 12-21. <https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v12i1.24>
- Sari, D. R. P., Hidayaturrahman, M., & Tini, D. L. R. (2024). Implementasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Untuk Keberlanjutan Pembangunan Sektor Pangan Di Kabupaten Sumenep. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 1, No. 1, pp. 641-657).
- Sari, N., Marta, A., & Afner, S. O. G. (2025). Optimalisasi Peran Penyuluh Pertanian dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Petani Padi Sawah di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*, 7(03), 180-188. <https://doi.org/10.23960/jsp.Vol7.No03.2025.415>
- Situmorang, Y. N. C., Armad, A., Azmi, A., & Arief, R. W. (2026). Sinergi Subsidi Pupuk dan Penyuluhan Pertanian Terhadap Produktivitas Padi Sawah di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, 6(2), 119-133. <https://doi.org/10.35706/agrimanex.v6i2.13614>

- Solihin, E., Sudirja, R., & Sari, S. L. (2025). Pengaruh Kombinasi Pupuk Makro Majemuk Cair dengan Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung (*Zea Mays L.*). *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 7(02), 604-612. <https://doi.org/10.53863/kst.v7i02.1767>
- Sriski, G. S., Taridala, S. A. A., & Abdullah, W. G. (2024). Analisis Saluran Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Petani Padi Sawah Di Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 1658-1665.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhada, I., Kusumawardani, W., & Fitri, I. (2022). Pengaruh Pupuk Granular Silikat Dengan Pupuk Rekomendasi Umum Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Padi (*Oryza Sativa L.*) Di Lahan Sawah Irigasi Teknis. *Jurnal Agroteknologi*, 2(1), 19-36.
- Susilowati, L. E., & Kusumo, B. H. (2019). Sosialisasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman jagung di Kabupaten Dompu. *Jurnal Gema Ngabdi*, 1(3), 103-108.
- Tyas, W., Rohmah, M., & Lestari, I. (2024). Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Tingkat Petani Kecamatan Buay Pemuka Peliung Ditinjau Dari Segi Ketepatan Tempat, Jumlah, Harga, Jenis, Waktu Dan Mutu. *SIMBIOSIS: Jurnal Sains Pertanian*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.30599/simbiosis.v1i1.3326>
- Widyastutik, W., Firdaus, M., Aminah, M., & Panjaitan, D. V. (2022). Benefits Analysis of Balanced Fertilizer Costs in the Order of Optimal Nutrition Fulfillment: RIA Approach: IPB University. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 35-55. <https://doi.org/10.29244/jekp.11.1.2022.35-55>
- Wijayanti, N., Nurwahidah, S., Hartono, Y., Mastar, S., & Pebriana, L. (2024). Efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 tepat di Kabupaten Sumbawa. *Musamus Journal of Agribusiness*, 7(1), 9-16. <https://doi.org/10.35724/mujagri.v7i1.5957>